

**EFEKTIVITAS FUNGSI *DIRECTING* LURAH DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI
KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

Oleh:

ANUGRAH GUSTI SAMPURNA PAKPAHAN
NPM: 2003100009

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : Anugrah Gusti Sampurna Pakpahan
NPM : 2003100009
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 01 Agustus 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP

(.....)

PENGUJI II : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si

(.....)

PENGUJI III : KHAIDIR ALI, S.Sos., M.P.A

(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M. Ikom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : ANUGRAH GUSTI SAMPURNA PAKPAHAN
NPM : 2003100009
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING LURAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI


Medan, 30 september 2024

PEMBIMBING


Khaidir Ali, S.Sos., M.PA
NIDN. 0104089401

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI


Ananda Mahardika, S.Sos. MSP
NIDN. 0122118801



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya **Anugrah Gusti Sampurna Pakpahan, NPM 2003100009**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima

Medan, 30 September 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in blue ink is written over a red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAN TEMPEL' and '2D1C7ALX393054282'.

Anugrah Gusti Sampurna Pakpahan

ABSTRAK

EFEKTIVITAS FUNGSI *DIRECTING* LURAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI

Anugrah Gusti Sampurna Pakpahan

2003100009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi directing lurah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi. Dalam penelitian yang di wawancarai yaitu Kepala Lurah, Kepling, dan Masyarakat Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi. Metode penelitian ini menggunakan metode dalam metode deskriptif pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah diimplementasikan secara cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam setiap prosesnya. Dalam hal ini, kurangnya informasi dari pemerintah maupun pihak dari kelurahan karena penyebab budaya, seperti kondisi masyarakat yang belum memiliki uang dan karena faktor perekonomian. pegawai perlu mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meminimalkan terjadinya tingkat kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berhubungan dengan terjadinya penyelewengan dalam pemungutan pajak.

Kata Kunci: Efektivitas, Fungsi Directing, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

ABSTRACT

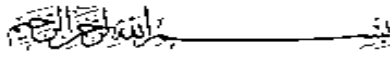
THE EFFECTIVENESS OF THE LURAH'S DIRECTING FUNCTION IN COLLECTION OF BUILDING TAX (PBB) IN BANDAR SAKTI DISTRICT, TEBING TINGGI CITY.

Anugrah Gusti Sampurna Pakpahan
2003100009

This research aims to determine the effectiveness of the sub-district head's directing function in collecting land and building tax (PBB) in Bandar Sakti Village, Tebing Tinggi City. In the research, those interviewed were the Head of the Village Head, Kepling, and the Community of Bandar Sakti Village, Tebing Tinggi City. This research method uses a descriptive method with a qualitative analysis approach. The research results show that land and building tax (PBB) levies have been implemented quite well, although there are still several obstacles in each process. In this case, the lack of information from the government and sub-district parties is due to cultural causes, such as the condition of people who do not have money and because of economic factors. Employees need to optimize the implementation of routine supervision over the management of Land and Building Tax to minimize the level of errors and violations in the implementation of Land and Building Tax (PBB) management which are related to fraud in tax collection.

Keywords: *Effectiveness, Directing Function, Land and Building Tax (PBB)*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya. Shalawat serta salam kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya, dan para pelanjut risalahnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Efektivitas Fungsi *Directing* Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi”.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam penulisan Skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya.

Dengan petunjuk dan bantuan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak maka penyelesaian atas Skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Mukhlis Pakpahan dan Ibunda Sri Mulyani, Amd.Keb yang dimana telah memberikan penulis cinta dan kasih sayang, arahan, bimbingan, dukungan, dan tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini penuh dengan semangat dan tanggung jawab.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Khaidir Ali, S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Purwati selaku pegawai Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi yang dimana telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Segenap staff pegawai dan masyarakat Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi yang telah membantu membimbing dalam penelitian ini.
11. Kepada saudara kandung penulis Kakak Paramitha Gusti Br Pakpahan, Amd.Keb dan Tuty Lishliani Br Pakpahan yang dimana selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis agar bisa menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada Abangda Muhammad Habibi Pakpahan, SP yang dimana selalu mensupport penulis agar bisa menyelesaikan penelitian ini.
13. Terimakasih buat pemilik nama Sekar Dewi Irmayani, S.E, terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penulis, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Semoga kamu menjadi perempuan pelabuhan terakhir dari banyaknya kisah yang ada. Doakan penulis setelah menyelesaikan skripsi ini mendapatkan pekerjaan yang layak agar bisa pulang kerumah yang sama.
14. Kepada Annisa Anggraini yang telah banyak membantu penulis memberikan pinjam laptop agar penulis bisa menyelesaikan separuh dari penelitian ini

15. Kepada Bagus Pratama, Sultan Muhammad Akbar Harahap, Soleh Ritonga yang dimana tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis, penulis mungkin bukan apa-apa saat ini.

Akhirul Kalam penulis memohon ampun kepada Allah SWT semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 13 Mei 2024

Penulis

Anugrah Gusti Sampurna Pakpahan
2003100009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penilaian	8
BAB II: URAIAN TEORITIS	10
2.1 Uraian Teoritis	10
1. Konsep Efektivitas	10
2. Uraian Efektivitas	11
3. Kepemimpinan Lurah	18
4. Pajak Bumi Bangunan (PBB)	21
BAB III: METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Kerangka Konsep	26

3.3 Definisi Konsep	28
3.4 Kategori Penelitian	29
3.5 Informasi Dan Narasumber	29
3.6 Sumber Data Penelitian	32
3.7 Teknik Pengumpulan Data	32
3.8 Analisis Data	34
3.9 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	34
3.10 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	36
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.2 Pembahasan	49
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Narasumber Serta Jabatan

Tabel 3.2 Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia

Tabel 3.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.5 Populasi Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan, Kepadatan Penduduk dan Laju

Pertumbuhan Penduduk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib yang wajib dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, HAM, Menku (1985) wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti. Pajak mempunyai 2 fungsi yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguler. Salah satu pajak yang ada di Indonesia yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (HAFSAH, 2019).

Pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional berdasarkan prinsip otonomi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata dan bertanggungjawab di daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1994 yang berbunyi “Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong royongan nasional dalam

pembiayaan negara dan pengenaannya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai kemampuannya.

Fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Dalam fungsi *budgetair* (penerimaan) bahwa pajak sebagai sumber dana bagi negara yang tujuannya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sedangkan pada fungsi *regulerend* (pengatur) dimana pajak merupakan sebuah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kelurahan adalah suatu wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan. kepemimpinan dalam suatu wilayah kelurahan yang di bebaskan kepada seorang lurah. Hal ini menjadi hal penting dalam menumbuhkan kesadaran warganya, yang juga merupakan sebuah faktor fungsi dan kewenangannya Kepada Gubernur Kepala Pemerintahan Provinsi dan Walikota Kepala Pemerintahan Kota dan Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi dibawahnya sebagai usaha mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itulah peranan kepala daerah sangat dituntut keaktifannya dalam hal pemungutan pajak ini.

Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan suatu tujuan yang mutlak yang harus dicapai, jika masing-masing kelurahan target pajak telah tercapai maka akan sangat membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. eferektiftas fungsi direkting Lurah dalam pemungutan pajak bumi bangunan (PBB) di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi akan berjalan efektif bilamana

telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi dalam hal ini adalah mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu organisasi bergerak kearah pencapaian tujuan. Dengan demikian inti kepemimpinan bukan pertama-tama terletak pada kedudukannya dalam organisasi, melainkan bagaimana pemimpin melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin. Selain itu, *figure* fungsi kepemimpinan adalah sebagai penggerak dan atau pendorong, fungsi dalam hal ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi yang selama ini dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunannya berjalan tidak baik melakukan kewajibannya masih terdapat masalah dalam pembayaran PBB oleh masyarakatnya. Adanya kecenderungan akan masyarakat Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi dalam membayar pajak tersebut harus dilihat dari berbagai hal yang menyangkut akan kesadaran masyarakat itu sendiri. Pengaruh kepemimpinan Lurah sebagai kepala pemerintahan terdepan untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Pada dasarnya pembayaran pajak dari rakyat ditujukan untuk kemakmuran rakyat, atau dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat. Pembangunan nasional yang menghasilkan perkembangan pesat diberbagai bidang kehidupan dan fasilitas-fasilitas umum yang semakin meningkat.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan kemudian dilakukan oleh pihak Kelurahan atau Pemerintahan Desa. Pihak Kelurahan atau Pemerintahan Desa,

termasuk Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi pada setiap tahunnya diberikan target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah ditentukan jumlahnya.

Pada kenyataannya target tersebut seringkali berada di luar jangkauan kemampuan pihak Kelurahan, karena di lapangan banyak ditemukan hal-hal yang pada akhirnya menyebabkan target yang ditentukan menjadi tidak tercapai.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, ditemukan beberapa data informasi seputar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi, yang yaitu: Pada tahun 2020, Jumlah WP (wajib pajak) yang melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Kota, dari keseluruhan Wajib Pajak, hanya berjumlah sebagian besar saja, dengan perolehan hanya 65,6 persen dari target 100 persen. Berarti terdapat sekitar 34,4 persen dana yang masih berada di wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya. Pada tahun 2021, perolehan dari pembayar Jumlah WP (wajib pajak) yang melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hanya 66 % dari target 100 %. Berarti terdapat sekitar 34 persen dana yang masih berada di wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya. Pada tahun 2022, perolehan dari pembayan Jumlah WP (wajib pajak) yang melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hanya 67 % dari target 100 %. Berarti terdapat sekitar 33 % dana yang masih berada di wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya (Data PBB Kelurahan Kota Tebing, 2022).

Adanya selisih antara jumlah target yang telah terdapat beberapa masalah, yakni salah satunya masih kurang optimalnya kinerja dari kolektor yang bersangkutan.

hal ini diketahui bahwa seringkali SPPT wajib pajak sudah sampai ke wajib pajak yang bersangkutan, namun petugas kolektor hanya menunggu sampai akhir jatuh tempo dan berharap WP segera melakukan kewajibannya. Waktu antara setelah Wajib Pajak (WP) menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sampai akhir tanggal jatuh tempo berlalu tanpa upaya penagihan.

Pengarahan merupakan kegiatan pemimpin dalam memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi kelurahan. Pengarahan, di satu pihak, kepemimpinan yang kuat, memungkinkan seorang pemimpin untuk rutin menginformasikan secara pasti, lengkap dan berulang terkait ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi ketika melaksanakan tugas sesuai kapasitas dan fasilitas yang tersedia, dan di lain pihak partisipasi anggota; secara khusus keterlibatan psikologis, dan komunikasi yang baik dapat menjadi faktor yang menentukan terjadinya proses pengarahan yang berkualitas (Jakhongir, 2021). Pengarahan dapat menjadi saat mengintegrasikan kegiatan semua anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengarahan berarti menggerakkan semua sumber daya untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang sudah direncanakan. Keberhasilan dari suatu kegiatan atau perusahaan dari organisasi tergantung pada proses pengarahannya. Untuk itu, dalam pemerintahan kepala Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi memiliki fungsi untuk mengarahkan (Directing) suatu program ataupun kegiatan yang sedang dilaksanakan di wilayahnya untuk mendapatkan hasil yang tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan. Kepemimpinan kepala Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi

dalam mengarahkan pelayanan di Kelurahan akan mempengaruhi perilaku manusia sebagai aktor intelektual.

Untuk mencapai dan keberhasilan segala aktivitas yang terdapat dalam organisasi hingga peranan kepemimpinan, seorang pemimpin sebagai top manager wajib bisa menggerakkan serta menggunakan kemampuan kekuatan ataupun keahlian yang dimiliki oleh para pegawai. Sebab kepemimpinan ialah aparatur sebagai penggerak dari pada seluruh sumber serta aspek penentu arah perjalanan suatu bangsa. Tujuan penelitian ini sebagai salah satu sumber dan potensi demi untuk menunjang hasil kekayaan negara, pendapatan daerah maupun pendapatan desa.

Fungsi Directing lurah adalah untuk mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat kelurahan. Tugas utama dari seorang lurah adalah memimpin dan mengelola pemerintahan di kelurahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat sekaligus juga sebagai penggerak upaya pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang diharapkan menjadi masukan dalam pembangunan dan kemajuan kesejahteraan masyarakat. Memberikan arahan (directing) ialah kegiatan yang mempengaruhi orang lain (influencing) dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja (motivating). Kepala dinas memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan. Kepala dinas mempunyai tupoksi untuk memimpin, membina, mengawasi, mengarahkan, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas. Dalam memberikan arahan harus dilakukan secara terus menerus guna menghasilkan kualitas kerja sesuai dengan visi misi organisasi (Sofiyanti & Khairiah, 2024). Berdasarkan fenomena masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu faktor yang bisa

berpengaruh terhadap kinerja kolektor dalam mencapai Efektivitas pencapaian perolehan Pajak Bumi dan Bangunan adalah faktor Kepemimpinan Kelurahan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di karenakan salah satu sumber dan potensi untuk menunjang hasil kekayaan negara, pendapatan daerah maupun pendapatan desa dengan judul **“Efektifitas Fungsi Direkting Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Fungsi Directing Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk Mengetahui Efektivitas Fungsi *Directing* Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penlitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan, khususnya mengenai gambaran Efektivitas Fungsi *Directing* Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi.
2. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan kajian ilmiah dalam bidang sosial tentang Efektivitas Fungsi *Directing* Lurah Dalam

Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi.

3. Secara Praktis diharapkan hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya dalam menggali dan mengeksplorasi terkait pengembangan aspek sosial tenaga Efektifitas Fungsi *Directing* Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab Ini Penulis Menguraikan Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II : Uraian Teoritis

Bab Ini Berisikan Tentang Pengertian Pengertian Efektifitas, Fungsi *Directing* Lurah, Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi.

BAB III : Metode Penelitian

Pada Bab Ini Berisikan Tentang Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Informan, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data, Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan Hasil Penelitian Dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Uraian Teoritis

1. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat (Rosalina 2012).

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Rosalina (2012) menyatakan bawah dalam mengenai di lihat sebagai berikut:

- (a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- (b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, diketahui bahwa strategi adalah pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- (c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- (d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- (e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- (f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, oleh karena salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- (g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarasanya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- (h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan, Steers (2009) mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

- (a) Pencapaian Tujuan : adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

- (b) Integrasi : yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- (c) Adaptasi : adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Menurut Rohiat (2010) directing atau pengarahan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan oleh orang banyak pada waktu yang sama dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan terdapat pada jalur yang telah ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat menimbulkan pemborosan.

Koontz dan O'Donnel (2019: 449) mengemukakan: *“Directing is the interpersonal aspect of managing by which subordinates are led to understand and contribute effectively and efficiently to attainment of enterprise objectives, directing involves guiding and leading subordinates.”* Koontz dan O'Donnel berpedapat bahwa melalui kegiatan pengarahan setiap orang dalam organisasi diajak atau dibujuk untuk memberikan kontribusinya melalui kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengarahan meliputi pemberian petunjuk/memberi gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehingga para manajer harus memotivasi staf dan personil organisasi agar secara sukarela mau melakukan kegiatan sebagai manifestasi rencana yang dibuat.

Pada hakikatnya pengarahan ini mengandung kegiatan motivasi (*motivating*). Kegiatan motivasi ini sebenarnya terdapat pada kegiatan directing sebagai sebuah fasilitas atau sarana melakukan pengarahan terhadap para personel dalam organisasi.

Fungsi pengarahan dan motivasi meliputi proses mobilitas manusia dan sumber daya yang lain untuk melaksanakan rencana dan menjalankan operasi rutin. Dengan adanya rencana yang ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah mengarahkan dan memotivasi sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana dimaksud. Termasuk dalam aktivitas ini adalah mengorganisasikan sumber daya manusia yang tersedia sedemikian rupa dalam bentuk kelompok-kelompok kerja sehingga memungkinkan menjalankan tugasnya secara optimal.

Menurut Stoner (2020, h: 33) *Leading* (memimpin) adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi. Memimpin itu meliputi mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Hubungan dan waktu bersifat sentral untuk kegiatan memimpin.

Di dalam aspek pengarahan ini akan timbul hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia mengerti dan

menyumbangkan tenaganya secara lebih berdaya guna untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, disini manajer atau pimpinan dituntut untuk dapat berkomunikasi, memberikan petunjuk/nasihat, berpikir kreatif, berinisiatif, meingkatkan kualitas serta memberikan stimulasi kepada karyawan. Dengan demikian kegiatan pengarahan ini banyak menyangkut masalah pemberian motivasi kepada para anggota organisasi, kepemimpinan serta pengembangan komunikasi.

Pengarahan berarti menentukan bagi bawahan tentang apa yang harus mereka kerjakan atau tidak boleh mereka kerjakan. Pengarahan mencakup berbagai proses operasi standar, pedoman, dan buku panduan, bahkan manajemen berdasarkan sasaran (*management by objective*). Pengarahan merupakan metode untuk menyalurkan perilaku bawahan dalam aktivitas tertentu dan menghindari aktivitas lain dengan menetapkan peraturan dan standar, kemudian memastikan bahwa peraturan tersebut dipatuhi. Jadi, pengarahan menentukan atau melarang jenis perilaku tertentu.

Menurut Atmodiwirio (2019) pengarahan merupakan proses pelaksanaan kerja nyata seorang bawahan yang dibimbing untuk mencapai tujuan umum. Namun, fungsi penggerakan/pengarahan/directing adakalanya disamakan dengan fungsi motivasi.

Menurut Hamalik (2020) dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses dan keberhasilan program pelatihan. Hal ni diperlukan sehubungan dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan tadi, sehingga terjadi peningkatan kegiatan personal, yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan keberhasilan program ini.

Sedangkan, menurut Handoko (2019) fungsi pengarahan (*leading*) secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan gaya, kualitas, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi *leading* sering disebut dengan bermacam-macam nama, antara lain *leading*, *directing*, *motivating*, *actuating* atau lainnya.

Bila fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut aspek-aspek abstrak proses manajemen, kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang dalam organisasi.

Dalam fungsi penggerakan, manajer memiliki deskripsi pekerjaan sebagai berikut:

- (a) Memberi tahu dan menjelaskan tujuan kepada para bawahan.
- (b) Mengelola dan mengajak para bawahan untuk bekerja semaksimal mungkin.
- (c) Membimbing bawahan untuk mencapai standar operasional (pelaksanaan).
- (d) Mengembangkan bawahan guna merealisasikan kemungkinan sepenuhnya.
- (e) Memberikan orang hak untuk mendengarkan.
- (f) Memuji dan memberikan sanksi secara adil.
- (g) Memberi hadiah melalui penghargaan dan pembayaran untuk pekerjaan yang diselesaikan dengan baik.
- (h) Memperbaiki usaha penggerakan dipandang dari sudut hasil pengendalian.

Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya

secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dalam melakukan pengarahan yaitu:

- (a) Prinsip mengarah kepada tujuan
- (b) Prinsip keharmonisan dengan tujuan
- (c) Prinsip kesatuan komando

Pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik mungkin, dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas.

Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa:

- (a) Orientasi : Merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
- (b) Perintah : Merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.
- (c) Delegasi wewenang Dalam pendelegasian wewenang ini pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya.

Menurut (Cicik, dkk, 2022) memberikan arahan (Directing) bermaksud untuk merealisasikan tujuan organisasi. Agar hal ini terjadi maka arahan tersebut

harus diiringi dengan pengawasan yang diperlukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terutama pemda dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya, beberapa orientasi yang diperlukan dalam menjalankan fungsi directing yakni;

- 1) Memberikan arahan secara berkesinambungan
- 2) Mencegah human error
- 3) Menciptakan creative activity (aktivitas kreatif)
- 4) Adanya dampak pengarahan terhadap kinerja

3. Kepemimpinan Lurah

Musakabe (2001). menuliskan bahwa pemimpin dan kepemimpinan adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan ataupun diabaikan (sine qua non) dari kehidupan manusia, adalah hal yang wajar dan manusiawi jika kita rindu datangnya pemimpin dengan kepemimpinan yang dapat mengubah keadaan menjadi makin mengemuka. Pemimpin dengan kepemimpinannya memegang peran strategis dan menentukan dalam menjalankan roda suatu organisasi, meningkatkan kinerja suatu lembaga atau perusahaan dan bahkan menentukan pasang surutnya kehidupan suatu bangsa dan negara. Seorang pemimpin sejati harus memiliki jiwa melayani, sedangkan pemimpin semu hanya mementingkan ambisi pribadi untuk mendapatkan kekuasaan mereka. Baik atau buruk kondisi suatu organisasi, bangsa atau negara, secara tidak langsung menggambarkan potret dari kualitas pemimpinnya dan kepemimpinan yang dijalankan.

Efektivitas kepemimpinan lurah ini merupakan kepemimpinan formal yang perilaku kepemimpinannya harus fokus terhadap peraturan yang ada dan menjalankan sebaik-baiknya. Dalam hal pengaruh kepemimpinan lurah dikategorikan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas yang ditugaskan, dikarenakan kepemimpinan lurah merupakan kewenangan kepemimpinan yang didapatnya dari jabatannya sebagai lurah, yang merupakan bagian dari sistem peranan formal. Kewenangan tersebut merupakan kekuasaan legitimasi. Artinya kekuasaan yang melekat pada jabatan tersebut untuk meyakinkan bahwa individu yang berada dalam jabatan dibawahnya telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada. Lurah merupakan Kepala Kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan yang membantu sebagian tugas camat seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005. Dengan demikian, lurah juga termasuk salah satu pemimpin birokrasi.

Lurah menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Dia mempunyai bawahan atau staf sebagai pengikutnya. Para bawahan itu berada dibawah garis komandonya. Mereka berada disitu karena sudah diatur oleh yang berwenang mengaturnya. Dinamakan pemimpin karena pada wujudnya ia bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan baik orang-orang yang ada di kesatuannya maupun fasilitas lain yang berada dalam wewenangnya". Dengan melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah apa yang dilakukan oleh lurah dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pelaksanaan aktual jabatan yang dipegangnya dalam rangka

untuk mendorong atau mengajak aparat dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Faktor yang menentukan juga dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan adalah bagaimana pemerintah Kelurahan Malanu dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen terkait dengan usaha meningkatkan pajak bumi dan bangunan di wilayahnya dan dapat menyadarkan masyarakat untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Peranan Lurah sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kelurahan dituntut untuk menunjukkan kemampuan manajerialnya terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Lurah dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai yang ada, serta memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin. Lurah merupakan subjek yang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui tuntutan dan anjuran kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.

4. Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 12 dan 13 disebutkan tentang Dana bagi hasil dari penerimaan PBB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. Penyaluran dana bagi hasil PBB sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan Undang Undang. Sebagaimana yang

terdapat dalam penjelasan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Lurah sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan Daerah Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 007/KMK.0411985 tentang pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada Gubernur kepala pemerintahan propinsi dan Walikota kepala pemerintahan kota dan Bupati kepala pemerintahan kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi dibawahnya sebagai usaha mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itulah peran kepala daerah sangat dituntut keaktifannya dalam hal pemungutan pajak ini.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu komponen yang mendukung dan perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasil. Oleh karena itu PBB perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa

pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penenmaan dalam negen merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sector pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum.

Lurah sebagai kepala pemerintahan terdepan untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Peranan Lurah sebagai pengkajian mengenai makna dari suatu realitas sosial dalam masyarakat. Kehidupan keseharian suatu masyarakat maupun kelompok-kelompok yang dimaknai secara sederhana dari masing-masing pelaku kehidupan itu. Lurah merupakan jabatan resnu yang dimiliki seseorang dalam kemampuannya meliputi proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Dimana Lurah dalam jabatannya diperoleh dari suatu usaha tertentu dalam pencapaiannya.

Selanjutnya disamping peran sebagaimana tersebut diatas, sistem birokrasi pemerintah tidak terlepas dari tipe ideal birokrasi yang merupakan tipe organisasi

yang hirarki dengan aturan dan dokumen tertulis dan cara-cara memaksa seperti halnya peran lurah dalam melakukan himbauan dan sosialisasi dalam mendorong partisipasi masyarakat membayar PBB. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa birokrasi merupakan salah satu struktur rasional yang memainkan peran yang begitu luas dalam masyarakat modern. Untuk mengajak masyarakat agar berperan secara aktif pada program PBB ini, pihak terkait atau Dinas Pendapatan Daerah sendiri yang langsung turun kelapangan mengadakan kunjungan dan memberikan arahan kepada masyarakat setempat untuk melakukan pembayaran PBB di setiap tahun karena hasil dari pembayaran PBB inilah yang nantinya akan di gunakan untuk pembangunan Kota Tebing Tinggi penjelasan yang telah dilakukan pihak DISPENDA itu sendiri masyarakat sudah mengerti sehingga menjamin untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi pada program pembayaran PBB tersebut hanya sebagian masyarakat yang sadar dan ikut berpartisipasi untuk melakukan pembayaran. Pihak Kelurahan terus melakukan cara seperti menyebarkan brosur, memasang spanduk "bayarlah pajak tepat waktu" yang di tempatkan di kantor Lurah, kantor Kepala Distrik, dan di persimpangan jalan. Itu dilakukan guna memberikan teguran kepada masyarakat agar sadar untuk melakukan pembayaran PBB.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada proposal ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (*holistic*) dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini akan menggali fakta yang ada mengenai Efektifitas Fungsi Direkting Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi. Data diambil secara sistematis, faktual dan akurat di lapangan. Data yang diambil berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data. Dalam hal ini didapatkan dengan observasi dan wawancara langsung kepada pihak terkait dalam hal ini Kelurahan Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi. Data sekunder menurut (Sugiyono, 2019) merupakan data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data.

Data sekunder biasanya bisa berupa dokumen, jurnal artikel, pemberitaan online maupun dari buku. Wawancara dilakukan dengan informan yang dapat memberikan informasi lengkap dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini secara umum adalah studi deskriptif yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dan bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang diteliti serta berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang menjadi pokok penelitian.

1. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek penelitian adalah objek yang menjadi titik perhatian suatu peneliti. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi. Dalam penelitian kualitatif, hal ini menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Informan adalah orang yang member informasi tentang dirinya dan orang lain (Hamidi., 2010, p. h. 5).

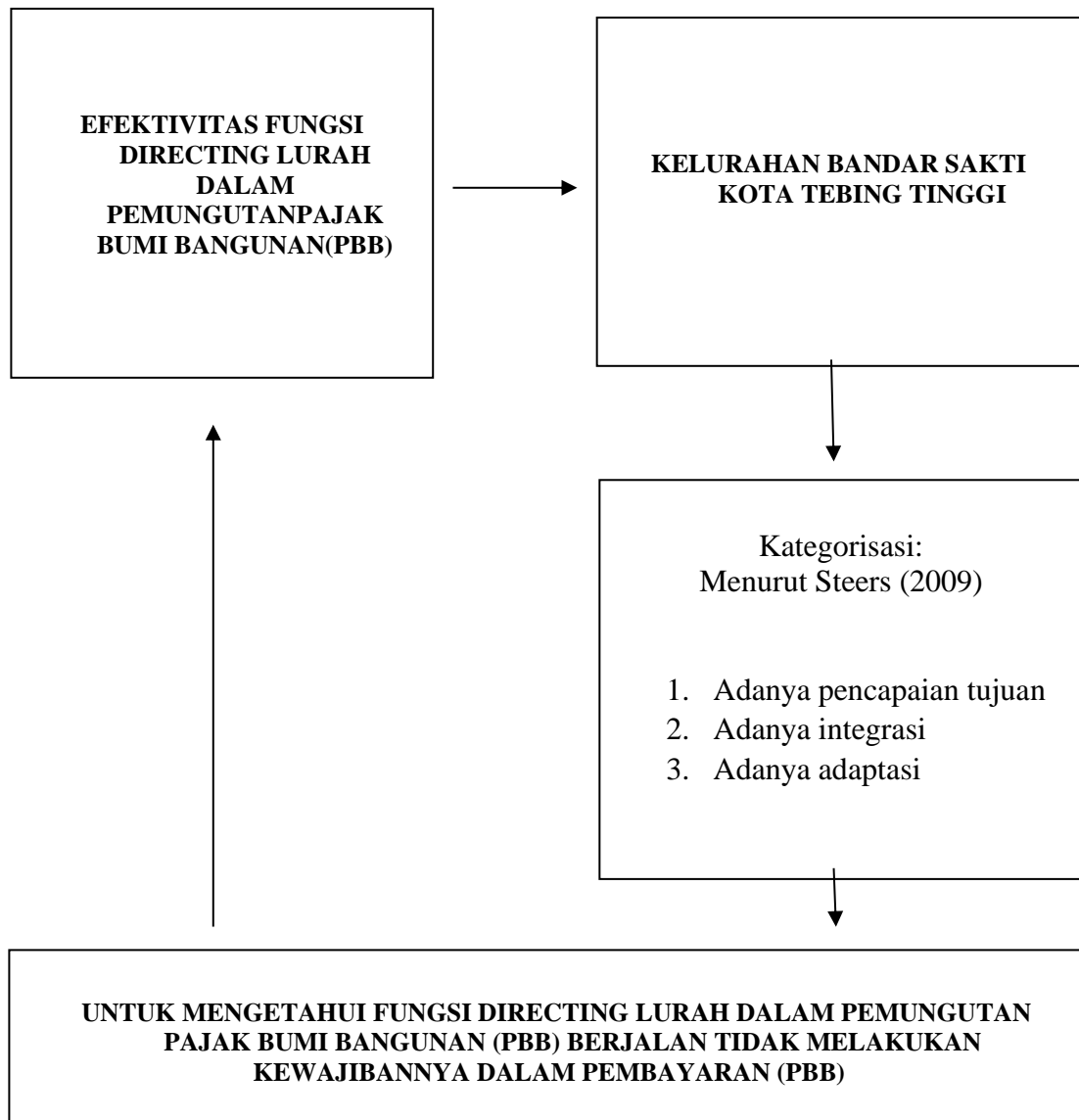
Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Memilih informan penelitian digunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dari petunjuk informasi pertama tersebut peneliti bisa menemukan informan yang kedua yang mungkin lebih banyak tahu mengenai informasinya, sehingga peneliti bisa menemui informan berikutnya lebih jauh dan mendalam (Sutopo, 2002) .

Alasan peneliti dalam menggunakan teknik wawancara ini yaitu dengan informasi yang terbatas dari responden awal dapat menjadi berkembang luas dan dapat meningkatkan jumlah responden dalam prosesnya guna mencapai suatu hasil yang akurat. Peneliti disini cukup mengambil satu orang atau atau lebih informan yang kemudian diwawancarai lalu peneliti disini berkerjasama atau meminta kepada informan yang diwanwancar sebelumnya untuk mewawancarai pihak

lainnya. Setelah jumlah yang diwawancara telah dirasa cukup memadai maka, peneliti disini dapat menghentikan pencarian informasi lainnya.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep Kerangka konsep pemikiran dalam penelitian ini adalah gambaran Efektivitas Fungsi *Directing* Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi. digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1: Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

Adapun defenisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Efektifitas: berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.
2. Directing atau pengarahan : kegiatan yang dilakukan oleh orang banyak pada waktu yang sama dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan terdapat pada jalur yang telah ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat menimbulkan pemborosan.
3. Lurah: merupakan kepemimpinan formal yang perilaku kepemimpinannya harus fokus terhadap peraturan yang ada dan menjalankan sebaik-baiknya. Dalam hal pengaruh kepemimpinan lurah dikategorikan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas yang ditugaskan, dikarenakan kepemimpinan lurah merupakan kewenangan kepemimpinan yang didapatnya dari jabatannya sebagai lurah, yang merupakan bagian dari sistem peranan formal.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu komponen yang mendukung dan perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasil.

Oleh karena itu PBB perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut (Ramadhan, 2021).

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya pengarahan dalam pencapaian tujuan.
2. Adanya Integrasi pemerintahan dan Masyarakat.
3. Adanya penyesuaian dalam prosedur.
4. Mengoptimalkan penerimaan.

3.5 Narasumber

Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut Informan Penelitian. Didalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara "*Purposive*" berkaitan

dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan.

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini yakni:

Tabel 3.1

No.	Nama Narasumber	Usia	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Purwati	56 Tahun	Lurah Bandar Sakti	SMA	Perempuan
2.	Cut Mutia	40 Tahun	Kepala Lingkungan Bandar Sakti	SMA	Perempuan
3.	M. Habibi	30 Tahun	Masyarakat	S1	Laki-Laki

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi, kepala lingkungan dan Masyarakat sekitar. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia

NO.	NAMA	JABATAN	USIA
1.	Purwati	Lurah Bandar Sakti	56 Tahun
2.	Cut Mutia	Kepala Lingkungan	40 Tahun
3.	M. Habibi	Masyarakat	30 Tahun

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Tabel 3.3
Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-Laki	1	20%
2.	Perempuan	2	80%
Jumlah		3	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Distribusi berdasarkan kelamin akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang atau 20% sedangkan yang berjenis Perempuan sebanyak 2 orang atau 80%.

Tabel 3.4
Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	S1	1	20%
2.	SMA	2	80%
Jumlah		3	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan data diatas, yang memiliki Tingkat Pendidikan SMA sebanyak 2 orang atau sebesar 80% dan yang berpendidikan S-1 sebanyak 1 orang atau 20%. Jadi, berdasarkan hasil data diatas dapat dikatakan narasumber yang paling dominan berdasarkan Tingkat pendidikannya yaitu SMA.

3.6 Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer yaitu berupa data dalam bentuk verbal baik objek materi maupun wawancara yang dilakukan kepada subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan objek yang diteliti atau yang diperoleh dari responden secara langsung. (Arikunto, 2010).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung data utama yang digunakan untuk menambah pengayaan dalam pembahasan penelitian. Data sekunder merupakan jenis data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti dari narasumber yang bersangkutan. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi, baik dari buku, arsip, data statistik, jurnal, dan lain-lain.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku

manusia proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak besar.

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai “perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu”. Adapun observasi ilmiah adalah “perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode *Interview* yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya”.

Jenis wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah jenis wawancara terbuka yang artinya wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, wawancara terbuka dilakukan pada tokoh masyarakat atau kepala desa dan wawancara tertutup artinya wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang menuntut jawaban tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life history*), biografi peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto.

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain. Analisis data menggunakan metode berfikir *deduktif*, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-teori menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan penalaran. Dengan metode ini, penulis mengambil kesimpulan dari pernyataan yang umum.

3.9 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis dan waktu penelitian selama 3 bulan dimulai pada tanggal 22 April 2024- 08 Juli 2024.

3.9.1 Visi dan Misi

Visi

“Memberikan Pelayanan Sepenuh Hati di Kelurahan Bandar Sakti Tebing Tinggi”

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dan Semua Pihak.
2. Terwujudnya Pelaksanaan Tertib Administrasi Di Masyarakat.
3. Menumbuhkan Citra Yang Baik Dimasyarakat Dengan Memberikan Pelayanan Prima.
4. Menciptakan Kemudahan, Keterbukaam, Kepastian, dan Tanggung Jawab Dalam Kegiatan Pelayanan.
5. Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Bersih, Rapi, dan Indah untuk Kepuasan Semua Pihak.

Tabel 3.5

Populasi Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1.	Bandar Sakti	5.084	0,7810	3760,8	1,02
2.	Bulian	5.765	1,5010	10895,7	2,06
3.	Brohol	5.827	2,4660	8970,6	1,8
4.	Durian	7.315	1,4040	1322,3	0,68
5.	Teluk Karang	2.401	0,3617	2310,2	2,16
6.	Pelita	2.562	1,2960	3403,7	1,54
7.	Pinang Mancung	4.118	1,2683	3791,3	2,52
Jumlah Kecamatan Bajenis		33,072	9,0780	3126,7	1,59

Sumber:Hasil Penelitian,2024

3.10 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Lurah

Lurah berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Lurah sebagai pelaksana Pemerintah Daerah ditingkat Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi:

- a) Menyusun Program Kerja dan kegiatan Kelurahan;
- b) Mengatur kegiatan Kelurahan meliputi penyiapan perumusan kebijakan teknis dan operasional di Kelurahan;
- c) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugasnya masing-masing;
- d) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- e) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan-kesalahan;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan diwilayah, dalam kegiatan pembangunan, sosial, ekonomi, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat agar terpadu dan terarah;

- g) Memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemeritahan umum dan agrarian, pembinaan Lembaga kemasyarakatan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah;
- h) Menyusun program/kegiatan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan;
- i) Memfasilitasi pembentukan, penggabungan wilayah Rukun Warga/Rukun Tatangga dilingkungan Kelurahan;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dengan Satuan Kerja Prangkat Daerah atau instansi terkait;
- k) Mengevaluasi kegiatan sesuai hasil yang telah dicapai;
- l) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat baik lisan maupun tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas. Lurah dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada camat.

b. Kepala Lingkungan

Kepala lingkungan adalah salah satu aparatur pemerintahan daerah, daerah mempunyai pengertian yang sering di konotasikan dengan wilayah administrasi pemerintahan, yaitu wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah lingkungan terkecil sebagai pembantu koordinator unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja tertentu dalam bidang kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah. Kepala lingkungan diangkat oleh camat atas usulan lurah kepada camat dengan memperhatikan saran atau perkembangan dari

masyarakat setempat, setelah itu camat akan melakukan verifikasi dan akan menerbitkan keputusan camat tentang pengangkatan kepala lingkungan kepada Walikota.

Kepala lingkungan dalam melaksanakan tugasnya hanya memiliki wewenang dan tidak memiliki kekuasaan seperti lurah. Dalam arti wewenang yang dapat dijelaskan seperti kekuasaan yang dilembagakan (institutionalized power) pengertian wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum dan hukum publik. Berbeda dengan lurah yang memiliki kekuasaan dalam arti memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Kewenangan kepala lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala lingkungan seperti membantu menyediakan data kependudukan serta perizinanya, membantu pelayanan administrasi, membantu mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu pelayanan administrasi, mengembangkan aspirasi masyarakat, menghubungkan masyarakat dengan pemerintahan kelurahan, dan melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan lurah dengan kepala lingkungan. Kepala lingkungan memiliki kedudukan yang sangat berarti dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban serta pembinaan warga, pencapaian kesuksesan tersebut berpedoman pada kesejahteraan warga Lingkungan IV Bulian Kelurahan Bandar Sakti. Dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan zaman, kelembagaan Lingkungan memegang peranan yang cukup sentral sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

Pemerintah yang terkelola dengan baik diterminologikan sebagai “*The Good Governance*” atau diartikan sebagai pengelola pemerintahan yang baik. Terutama dalam menjaga stabilitas ketertiban nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang terus dinamis dan menjadi unsur yang penting dalam menjembatani implementasi berbagai program Pemerintah Kota kepada masyarakat. Sering dikatakan bahwa kepala lingkungan merupakan perpanjangan tangan lurah, yang berfungsi melakukan pendataan penduduk dan pelayanan administrasi, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, serta kerukunan hidup antar warga dan penggerak swadaya gotong royong dan pengendalian lingkungan dengan berkordinasi dengan kegiatan siskamling. Kepala lingkungan merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintahan

Kelurahan yang memiliki kewajiban dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan. Kepala lingkungan memiliki tugas dan fungsi yang sangat signifikan dalam masyarakat karena kepala lingkungan harus bisa melayani masyarakat dalam berbagai kebutuhan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melayani segala jenis administrasi, menanggapi keluhan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat, membantu mewujudkan kelancaran program-program pemerintah, dan sebagainya. Penataan dalam pelaksanaan pemerintahan yang mengarah pada fungsi pelayanan masyarakat yang ditekankan pada kepala lingkungan. Selain itu, kepala lingkungan merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Kepala lingkungan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelurahan dan

khususnya di wilayah lingkungan akan membantu penyelesaian masalah tersebut. Diantara permasalahan yang sering diangkat dalam rapat-rapat koordinasi dan laporan yang di sampaikan kepada pihak kecamatan atau pemerintah kabupaten adalah pertama, masalah pengumpulan data yang sering terlambat dan kurang atau tidak valid, seperti data profil kependudukan, data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan-bantuan sosial dan data-data lain yang dalam pengumpulannya melibatkan kepala lingkungan. Kedua, permasalahan dalam pembuatan surat tanah yang masih sering terjadi seperti data saksi yang tidak lengkap, keterangan asal usul tanah yang dimanipulasi, biaya pembuatan surat yang tidak sesuai, dan kurangnya dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan. Ketiga, masalah sosialisasi program-program pembangunan yang tidak terealisasi sehingga tidak sampai kepada masyarakat, kondisi ini dapat disebabkan karena kemampuan kepala lingkungannya yang masih kurang dan masih minimnya dukungan dana serta sarana yang tersedia.

Tugas Pokok

1. Penyelenggaraan dan evaluasi di bidang pemerintahan;
2. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi ekonomi dan pembangunan;
4. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan.
7. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.

8. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
9. Menyampaikan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
10. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
11. Penggali, pendayagunaan dan perkembangan potensi sumber daya, serta keserasian lingkungan hidup.

Indikator

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum
5. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
6. Melaksanakan ketatausahaan kepegawaian dan keuangan kelurahan.
7. Melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyusunan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kajian Lingkungan hidup strategis kabupaten
10. Pelaksanaan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup
11. Pengoordinasian pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

12. Pembinaan tata laksana AMDAL dan penilaian dokumen lingkungan serta proses ijin lingkungan.
13. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam
14. Pemberian rekomendasi izin lingkungan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana Efektivitas Fungsi *Directing* Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu pertama diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 3 orang informan penelitian yang terdiri dari 1 orang Kepala Lurah, 1 Orang Kepala Lingkungan Bandar Sakti dan 1 orang masyarakat sekitar Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu minggu.

Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses yang tanya jawab dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

a. Adanya Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian-pencapaian bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Purwati selaku Kepala Lurah Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Senin, 22 April 2024 menyatakan bahwa:

“Dalam arahan pemungutan Pajak Bumi Bangunan kami sudah mengetahuinya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Purwati selaku Kepala Lurah Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Selasa, 23 April 2024 menyatakan bahwa:

“Betuk arahan yang dilakukan dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan memang sering sekali dari kelurahan Bandar Sakti ini memberikan pengarahan tentang wajib pajak tetapi tidak semua Masyarakat memahami akan pajak itu sendiri karena factor Pendidikan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Purwati selaku

Kepala Lurah Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Rabu, 24 April 2024 menyatakan

bahwa:

“Orang yang berperan dalam pengutipan Pajak Bumi Bangunan di sini ada yang namanya petugas kolektor kelurahan ia merupakan pegawai lurah yang diberikan tugas pokok dan fungsi khusus oleh kepala lurah yaitu melakukan pendistribusian SPPT dan mengumpulkan penagihan Pajak Bumi Bangunan yang ada dikelurahan, untuk selanjutnya akan disetor ke kas negara melalui bank yang sudah ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Purwati selaku

Kepala Lurah Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Kamis, 25 April 2024 menyatakan

bahwa:

“Kendala dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan itu sering terjadi, tetapi kami tetap harus memberikan informasi tentang PBB tersebut walaupun ketika dalam pertemuan pada saat membahas tentang pembayaran PBB kepada masyarakat seolah-olah masyarakat tidak begitu merespon bahkan sering kali masyarakat malah mengganti topik pembicaraan. Akan tetapi kami selalu mengambil alih pembicaraan kepada topik semula yaitu tentang pajak, kalau tidak seperti itu ya mungkin yang lain juga ikut terpengaruh”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Purwati selaku

Kepala Lurah Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Jumat, 26 April 2024 menyatakan

bahwa:

“Saran dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan saya selaku kepala lurah Bandar Sakti untuk Masyarakat sekitar agar lebih di tingkatkan lagi untuk membayar kewajibannya sebagai Masyarakat yang akan taat pajak”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi sudah melakukan kegiatan arahan tentang wajib pajak tetapi tidak semua Masyarakat memahami akan pajak itu sendiri karena factor pendidikan. Dalam pemungutan PBB di kelurahan Bandar Sakti sudah ada petugasnya masing-masing yang diberikan khusus oleh kepala lurah yaitu memberikan pendistribusian SPPT dan mengumpulkan penagihan PBB yang ada di kelurahan, untuk selanjutnya akan disetor ke kas negara melalui bank yang sudah ditetapkan. Kendala yang sering terjadi di masyarakat bandar sakti yaitu ketika memberikan informasi mengenai PBB Masyarakat seolah-olah tidak begitu merespon.

b. Adanya Integrasi:

Pengertian Integrasi seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang mencerminkan keadaan penuh rasa kesatuan antara bagian atau unsur yang satu dengan unsur lainnya. Selain itu, integrasi juga bisa diartikan sebagai suatu metode untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi, bagian-bagian, dan tugas yang ada pada suatu pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Cut Mutia selaku Kepling Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Senin 22 April 2024 menyatakan bahwa:

“Integrasi dalam pemungutan PBB di kelurahan Bandar Sakti sudah terlaksana dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Cut Mutia selaku Kepling Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Selasa 23 April 2024 menyatakan bahwa:

“Integrasi yang digunakan dalam proses pemungutan PBB dengan cara membagikan SPPT nya langsung ke masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk membayar melalui yang namanya Sumut Mobile yang sudah disediakan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Cut Mutia selaku Kepling Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Rabu 24 April 2024 menyatakan bahwa:

“Sistem yang digunakan dalam pembayaran PBB kami selalu mengarahkan masyarakat untuk membayar langsung ke Sumut Mobile agar mempermudah masyarakat membayar PBB tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Cut Mutia selaku Kepling Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Kamis 25 April 2024 menyatakan bahwa:

“Kendala ketika pemungutan PBB berlangsung sebagian masyarakat tidak puas atas kinerja pemerintah, melihat jalan-jalan yang rusak jadi itulah alasan mereka untuk membayar PBB”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Cut Mutia selaku Kepling Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Jumat 26 April 2024 menyatakan bahwa:

“Saran dalam proses integrasi pembayaran PBB yaitu masyarakat lebih tepat waktu lagi untuk membayar PBB agar semua infrastruktur terlaksana lebih bagus contohnya memperbaiki jalan-jalan yang rusak jadi kinerja pemerintah juga bagus”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi integrasi dalam pemungutan PBB sudah terlaksana dengan baik. Proses pembayaran PBB Masyarakat diarahkan untuk membayar melalui Sumut Mobile agar lebih mempermudah masyarakat untuk membayar PBB tersebut. Kendala pemungutan PBB masyarakat kelurahan Bandar Sakti tidak puas atas kinerja pemerintah, contohnya melihat jalan-jalan yang rusak jadi itulah alasan mereka lalai untuk membayar PBB.

c. Adanya Adaptasi:

Adaptasi merupakan penyusunan diri dan cara atau proses penyesuaian diri pada setiap individu atau manusia berbeda-beda. Ada yang proses adaptasinya cepat, ada pula yang relative lama. Tidak masalah, pada intinya kita hanya harus tetap melakukan

penyesuaian diri. Adaptasi merupakan respon individu terhadap suatu perubahan yang ada di lingkungan yang dapat memengaruhi keutuhan tubuh. Secara umum tujuan adaptasi adalah agar individu mampu menghadapi tuntutan keadaan secara sadar, realistic, objektif, dan rasional.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Habibi selaku Masyarakat Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Senin 29 April 2024 menyatakan bahwa:

“Sejauh ini adaptasi yang dilakukan dalam pemungutan PBB belum sempurna dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Habibi selaku Masyarakat Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Selasa 30 April 2024 menyatakan bahwa:

“Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemungutan PBB biasanya saya membayar PBB pada bank yang sudah ditentukan atau melalui petugasnya langsung”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Habibi selaku Masyarakat Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Kamis 02 Mei 2024 menyatakan bahwa:

“Yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemungutan PBB menurut saya kurangnya informasi dari pemerintah, penyebabnya kondisi masyarakat belum memiliki uang dan faktor ekonomi khususnya yang saat ini saat saya alami sekarang”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Habibi selaku Masyarakat Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Jumat 03 Mei 2024 menyatakan bahwa:

“Kendala adaptasi ke masyarakat adanya hambatan dalam pemungutan PBB mengakibatkan kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh kabupaten”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Habibi selaku Masyarakat Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Senin 06 Mei 2024 menyatakan bahwa:

“Saran yang dilakukan dalam pemungutan PBB ke masyarakat perlunya sosialisasi mengenai peranan melunasi pajak, dan cara pembayaran wajib pajak agar warga melunasi pajak terus meningkat”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi adaptasi yang dilakukan dalam pemungutan PBB sejauh ini belum sempurna. Biasanya masyarakat ketika hendak ingin membayar PBB mereka diarahkan untuk membayar melalui bank yang sudah ditentukan atau melalui petugasnya langsung. Penyebabnya rendahnya kesadaran masyarakat kelurahan Bandar Sakti terhadap pemungutan PBB ialah kurangnya informasi dari pemerintah dan kondisi masyarakat belum memiliki uang karena faktor ekonomi.

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan di analisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang Efektivitas Fungsi *Directing* Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan hal tersebut penulis

melakukan analisis terhadap permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraikan hasil analisis berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

1. Adanya Pencapaian Tujuan

Steers (2019) mengatakan pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

Menurut Farida (2022) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar output dalam pencapaian tujuan maka organisasi, program atau kegiatan semakin efektif organisasi. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan dengan melalui konsep efektivitas. Konsep merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses maupun keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Berdasarkan teori tersebut peneliti menilai bahwa Efektivitas yang dilakukan Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi terhadap pemungutan PBB sudah mengetahui arahan pemungutan PBB.

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil penelitian kepada para narasumber dalam kaitannya dengan hasil penelitian efektivitas fungsi directing lurah dalam pemungutan pajak bumi bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi sering memberikan pengarahan tentang wajib pajak tetapi tidak semua Masyarakat memahami akan pajak itu sendiri karena factor Pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Ibu Purwati selaku Kepala Lurah Bandar Sakti pada tanggal 22 April 2024. Selanjutnya yang berperan dalam pengutipan PBB ialah ada yang namanya petugas kolektor kelurahan ia merupakan pegawai lurah yang diberikan tugas pokok dan fungsi khusus oleh kepala lurah yaitu melakukan pendistribusian SPPT dan mngumpulkan penagihan PBB yang ada di kelurahan, untuk selanjutnya akan disetor ke kas negara melalui bank yang sudah ditetapkan. Kemudian adapun kendala dalam pemungutan PBB di kelurahan Bamdar Sakti yaitu sering terjadi masyarakat seolah-olah tidak begitu merespon bahkan sering kali Masyarakat mengganti topik pembicaraan apabila kegiatan mengenai informasi PBB berlangsung.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas antara hasil penelitian dikaitkan dengan teori adanya pencapain tujuan dapat diambil kesimpulan bahwa kepala lurah Bandar Sakti sudah memberikan informasi mengenai PBB, dari mulai cara membayar melalui bank yang sudah ditetapkan maupun pembayaran secara

langsung namun Masyarakat kurang kesadaran mengenai pemungutan PBB seolah-olah mereka tidak mau peduli dengan hal itu, tetapi pihak kelurahan tetap selalu memberikan informasi tentang pemungutan PBB melalui pertemuan-pertemuan yang sudah ditentukan oleh mereka.

2. Adanya Integrasi

Steers (2019) mengatakan Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

pengertian integrasi dari beberapa ahli. Dari beberapa pengertian tersebut, maka bisa dikatakan bahwa integrasi merupakan suatu hal yang sangat diharapkan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari karena dengan adanya integrasi, setiap anggota masyarakat walaupun berbeda kebudayaan tetap bisa hidup damai dan berdampingan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi setiap warga negara khususnya warga negara Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara mempertahankan suatu integrasi. Selain itu, integrasi juga bisa diartikan sebagai metode untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi, bagian-bagian, dan tugas yang ada pada suatu pekerjaan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para narasumber kelurahan Bandar Sakti sudah menjalankan dengan baik integrasi dalam pemungutan PBB tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa antara hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori dari adanya integrasi mengenai integrasi yang digunakan dalam proses pemungutan PBB dengan cara membagikan SPPT nya

langsung ke masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk membayar melalui yang namanya Sumut Mobile yang sudah disediakan. Hal ini dapat mempermudah akses masyarakat kelurahan Bandar Sakti dalam pembayaran PBB.

3. Adanya Adaptasi

Steers (2019) mengatakan adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan dan segala sesuatu yang lain ketika seseorang itu berada pada suatu lingkungan. Seperti yang dikatakan Marzali dalam bukunya bahwa strategi adaptasi secara luas merupakan upaya yang dilakukan seseorang dalam menentukan strategi adaptasi yang tepat melalui tindakan atau perbuatannya sehingga dapat mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk menghadapi berbagai masalah sebagai suatu pilihan yang tepat agar sesuai dengan lingkungan sosial, kultur dan ekologis ditempat yang ditinggalinya (Marzali, 2022:26). Adaptasi menurut Adimiharja (2023:11) adalah usaha manusia untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tertentu dalam mendayagunakan sumber daya untuk menghadapi masalah yang mendesak. Bannet (2019:28) menyatakan bahwa adaptasi adalah suatu mekanisme penyesuaian yang dimanfaatkan manusia sepanjang kehidupannya. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara kepada narasumber bahwa adaptasi yang dilakukan di kelurahan Bandar Sakti dalam pemungutan PBB belum terlaksana dengan sempurna karena penyebabnya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemungutan PBB.

Pihak kelurahan juga selalu memberikan informasi kepada masyarakat kelurahan Bandar Sakti bahwa pentingnya membayar PBB tepat waktu tetapi masyarakat menganggap kurangnya informasi dari pemerintah maupun pihak dari kelurahan karena penyebab budaya, seperti kondisi masyarakat yang belum memiliki uang dan karena faktor perekonomian.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa antara hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori dari adanya adaptasi dapat disimpulkan bahwa adanya hambatan dalam pemungutan PBB mengakibatkan kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh kabupaten dan kurangnya informasi dari pemerintah sehingga masyarakat juga seolah-olah tidak patuh akan wajib pajak tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian dan pembahasan yang telah penulis peroleh maka dapat disimpulkan yaitu, Efektivitas Fungsi *Directing* Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi, dapat di analisis bahwa adanya pencapaian tujuan kepala lurah Bandar Sakti sudah memberikan informasi mengenai PBB, dari mulai cara membayar melalui bank yang sudah ditetapkan maupun pembayaran secara langsung namun Masyarakat kurang kesadaran mengenai pemungutan PBB seolah-olah mereka tidak mau peduli dengan hal itu, tetapi pihak kelurahan tetap selalu memberikan informasi tentang pemungutan PBB melalui pertemuan-pertemuan yang sudah ditentukan oleh mereka. Selanjutnya yang berperan dalam pengutipan PBB ialah ada yang namanya petugas kolektor kelurahan ia merupakan pegawai lurah yang diberikan tugas pokok dan fungsi khusus oleh kepala lurah yaitu melakukan pendistribusian SPPT dan mngumpulkan penagihan PBB yang ada di kelurahan, untuk selanjutnya akan disetor ke kas negara melalui bank yang sudah ditetapkan.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi setiap warga negara khususnya warga negara Indonesia kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara mempertahankan suatu integrasi. Selain itu, integrasi juga bisa diartikan sebagai metode untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi, bagian-bagian, dan tugas yang ada pada suatu pekerjaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh kelurahan Bandar Sakti sudah menjalankan dengan baik integrasi

dalam pemungutan PBB tersebut. Adanya integrasi, mengenai integrasi yang digunakan dalam proses pemungutan PBB dengan cara membagikan SPPT nya langsung ke masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk membayar melalui yang namanya Sumut Mobile yang sudah disediakan. Hal ini dapat mempermudah akses masyarakat kelurahan Bandar Sakti dalam pembayaran PBB.

Pihak kelurahan juga selalu memberikan informasi kepada masyarakat kelurahan Bandar Sakti bahwa pentingnya membayar PBB tetap waktu tetapi masyarakat menganggap kurangnya informasi dari pemerintah maupun pihak dari kelurahan karena penyebab budaya, seperti kondisi masyarakat yang belum memiliki uang dan karena faktor perekonomian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah diimplementasikan secara cukup baik. Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam setiap prosesnya. dalam hal ini, pegawai perlu mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan pajak bumi dan bangunan untuk pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang berhubungan dengan terjadinya penyelewengan dalam pemungutan pajak. adanya adaptasi dapat disimpulkan bahwa adanya hambatan dalam pemungutan PBB mengakibatkan kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh kabupaten dan kurangnya informasi dari pemerintah sehingga masyarakat juga seolah-olah tidak patuh akan wajib pajak tersebut. Walaupun sering terjadi kendala ketika pemungutan PBB berlangsung karena sebagian masyarakat tidak puas atas kinerja pemerintah, melihat jalan-jalan yang rusak jadi itulah alasan mereka untuk membayar PBB, akan tetapi pihak kelurahan tak pernah bosan untuk selalu memberitahukan informasi mengenai pemungutan PBB.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Efektivitas Fungsi *Directing* Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi. Maka dapat dikemukakan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan selaku kepala lurah Bandar Sakti untuk masyarakat sekitar agar lebih di tingkatkan lagi untuk membayar kewajibannya sebagai masyarakat yang akan taat pajak.
2. kurangnya informasi dari pemerintah maupun pihak dari kelurahan karena penyebab budaya, seperti kondisi masyarakat yang belum memiliki uang dan karena faktor perekonomian.
3. Dalam proses integrasi pembayaran PBB masyarakat lebih tepat waktu lagi untuk membayar PBB agar semua infrastruktur terlaksana lebih bagus contohnya memperbaiki jala-jalan yang rusak jadi kinerja pemerintah juga bagus.
4. Yang dilakukan dalam pemungutan PBB ke masyarakat perlunya sosialisasi mengenai peranan melunasi pajak, dan cara pembayaran wajib pajak agar warga melunasi pajak terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, T. d. (2003). *ancang Bangun Sistem Informasi*. tegal: urnal Informatika: Jurnal.
- Abrar Adhani, d. (2017). *PERSEPSI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS*. Medan: Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2017 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ade, R. R. (2020). *ingkat Literasi Digital Mahasiswa Jurusan Ilmu*. Palembang: urnal Kajian Informasi dan Perpustakaan.
- Ade, R. R. (2020). *Tingkat Literasi Digital Mahasiswa Jurusan Ilmu*. Palembang: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan.
- Afandi, M., & Warjio. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 6, 92-113.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (Atmodiwirio. ((2019). *Manajemen Training*. Jakarta: Jalai Pustaka,1993.
- A. Priadi, B. (2017). *Media & Teknologi dalam Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Cicik, dkk. (2022). *SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN*., Jakarta: CV. Literasi Nusantara.
- Coates, K. &. (2014). *An introduction to information design*. London: Laurence King Publishing Ltd.
- Coates, K. &. (2014). *An introduction to information design*. London: Laurence King Publishing Ltd.
- Darat, D. J. (2011). *KECELAKAAN LALU LINTAS TEMPATI URUTAN TIGA PENYEBAB KEMATIAN*. Jakarta: Biro Komunikasi dan Informasi Publik.
- Data PBB Kelurahan Kota Tebing. (2022). *Pemunguan PBB*. Kota Tebing Tinggi: Kelurahan KotaTebing Tinggi.
- Diupdate pada 2023-04-25 10:52:46 WIB). (n.d.).
- Fadli. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Humanika,.
- HAFSAH. (2019). EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK BUMI. *jurnal.umsu.ac.id*, 1-13.
- HAM, Menku. (1985). *UU RI Nomor 12 Tahun 1985 Tentang PBB*. Indonesia: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1985/12TAHUN1985UU.pdf>.
- Hamalik. (1994). *Encyclopedia of Education Research*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamidi. (2010). *Metode penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press.
- Handoko, T. H. ((2019.). *Manajemen*. Jakarta: BPFE.
- http://www.definisi-pengertian.com/2015/07definisi-pengertian_pemanfaatan.html. (n.d.).
- Harefa, M. (2020, Juni). KENDALA IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PBB-P2 OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7, 67-82.

- Imelda & Erik, M. (2014). *Perancangan Sistem Informasi Akademik Pada Sekolah*. Jakarta: Informatika Bandung.
- J. Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.
- Jakhongir. (2021). Scientific Horizon in the Context of Social Crises 68 the Difference Between Educational.
- Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi. (January 16th, 2023). Kemampuan Literasi Media Sebagai Upaya Mengantisipasi. *Jurnal Interaksi Ilmu Komunikasi*.
- Koontz, O'Donne. (1980). *Management, Edition VII*. Tokyo: Mc Graw-Hill.
- Lindawati, S. H. (2020). *Pemasaran Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- MABES POLRI . (n.d.). <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/7825-polda-sumut-imbau-masyarakat-waspada-jalur-berastagimedan-libur-lebaran>, 1.
- Medan, C. I. (2023). *4,4 Juta Pemudik Diprediksi Masuk Sumut, Puncak Mudik H-2*. Medan: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230414191807-20-937979/44-juta-pemudik-diprediksi-masuk-sumut-puncak-mudik-h-2>.
- Musakabe,. (2001). *Pemimpin dan Krisis Multidimensi, Etika dan Moralitas*. Jakarta: Yayasan Citra Insan Pembaru.
- Musakabe, Herman,. (2020). *Mencari Kepemimpinan Sejati Di Tengah Krisis dan Reformasi*. Jakarta: Citra Insan Pembaru.
- Naibaho, R. (2023). *Kakorlantas Resmi Tutup Operasi Ketupat 2023: Tahun Ini Berjalan Kondusif*. Jakarta: detikNews<https://news.detik.com/berita/d-6699193/kakorlantas-resmi-tutup-operasi-ketupat-2023-tahun-ini-berjalan-kondusif>.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*,. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Paramita, C. d. (2020). *Kebebasan Media Mengancam Literasi Politik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pemanfaatan, D. (2015). <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html>. Jakarta.
- Poldasu. (2003). *Polda Sumut Imbau Masyarakat Waspada Jalur Berastagi-Medan Libur Lebaran*. Sumut: Tribatanews.sumut.polri.go.id.
- POLRI, M. (n.d.).
- Polri, S. (2023). *Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)*. Jakarta: <https://polri.go.id/spkt>.
- Prehant, D. R. (2020). *BUKU AJAR KONSEP SISTEM INFORMASI*. Jakarta: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Rahmawan, E. (2019). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (STUDI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN SUNGAI HULU TENGAH). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 1, 23-39.
- Ramadhan, I. (2021, Desember). Fungsi Perencanaan Partisipatif Dalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, Vol 1, 1-10.
- Richard M. Steers,. (2009). *Efektivitas Organisasi*,. Yogyakarta:: Pustaka Pelajar,.
- Roheman, I., & Anita, D. (2022). Peran Petugas Kolektor Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-

- P2) Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kecamatan Subang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Serangpanjang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6, 2404-2412.
- Rohiat. ((2010). *Manajemen Sekolah Teori dan Praktik*. Bandung : PT Refika: PT Refika.
- Rosalina 2012. (n.d.). *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*. Jakarta: Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012). h. 3.
- Rudianto, M. D. (2021). *Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap*. Medan: PERSEPSI: Communication Journal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Silalahi, S. d. (2013). *Efektivitas Penggunaan Media*. Jakarta: Jurnal.
- Sofiyanti, T., & Khairiah, N. (2024, Juni). STRATEGI DIRECTING UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DALAM. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, Volume 4, 1-9.
- Stoner, J. A. (1996). *Manajemen*. Jakarta: PT Prenhalindo.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Susanti, R. (2011). *Sumber Informasi*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- TRIANA, N. (14 Mei 2023 10:07 WIB). *Perilaku Buruk Pengemudi Musuh Segala Bangsa*. Jakarta.
- WJS, P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- WJS, P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yusni Farida. (2022, Juni). EFEKTIVITAS LAYANAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BENTENG. *Jurnal Manajemen Pelayanan, Volume 3*, 962-972.

LAMPIRAN



Foto Denah Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi



Foto Struktur Organisasi Yang Berada Di Kantor Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi



Foto Bersama Pegawai Serta Staff Yang Berada Di Kelurahan Bandar Sakiti Kota Tebing Tinggi



Foto Bersama Pegawai Kepala Lurah Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi



Foto Bersama Salah Satu Kepling Yang Berada Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi



Foto Keberadaan Kantor Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi



*Acc. Kelengkapan
19/3-2024*
[Signature]

**Daftar Wawancara Penelitian Skripsi:
Anugrah Gusti Sampurna Pakpahan NPM: 2003100009**

Judul:

**Efektivitas Fungsi Directing Lurah Dalam Pemungutan Pajak Bumi
Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi***

Nara Sumber:

N a m a : *Cut Mutia*
U m u r : *40 Tahun*
Pendidikan Terakhir : *SMA / sederajat*
Jabatan : *Kepting (Kepala lingkungan)*

Pertanyaan,

Kategorisasi Penelitian

Adanya Pencapaian Tujuan:

1. Menurut bapak/ibu apakah sudah mengetahui arahan pemungutan Pajak Bumi Bangunan (*PBB*)?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana bentuk arahan yang dilakukan dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan (*PBB*)?
3. Menurut bapak/ibu siapakah yang berperan dalam pengutipan Pajak Bumi Bangunan?
4. Menurut bapak/ibu adakah kendala dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan?
5. Apakah yang menjadi saran dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan?

Kategori Adanya Integrasi:

1. Menurut bapak/ibu apakah integrasi dalam pemungutan PBB sudah terlaksanakan?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana integrasi yang di gunakan dalam proses pemungutan PBB?
3. Menurut bapak/ibu sistem apa yang digunakan dalam pembayaran PBB?
4. Apa yang menjadi kendala dalam pemungutan PBB?
5. Apakah yang menjadi saran dalam proses integrasi pembayaran PBB?

Kategori Adanya Adaptasi:

1. Menurut bapak/ibu apakah adaptasi yang dilakukan dalam pemungutan PBB sudah terlaksana kan dengan baik?
2. Menurut bapak/ibu langkah langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pemungutan PBB?
3. Menurut bapak/ibu apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemungutan PBB?
4. Menurut bapak/ibu apa kendala adaptasi ke masyarakat?
5. Menurut bapak/ibu saran apa yang harus dilakukan dalam pemungutan PBB ke masyarakat?



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Anugerah Gusti Sampurna Pakpahan

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Efektivitas fungsi Directing Lurah dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 4 No 2 December (2024). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, July 24, 2024

Editor In Chief


(Kifaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umcu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891



UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DAN-PT/AK/KP/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622407 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 @mgastalpa@umsu.ac.id **balp@umsu.ac.id Iumsu@umsu.ac.id fumsu@umsu.ac.id umsmedan@umsu.ac.id umsmedan@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik / IAP
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 31 Januari 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Angela Gani Sumpina P.
 N P M : 20031000009
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 SKS diperoleh : SKS, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Peretujuan
1	Efektivitas Fungsi Direktorat Bea dan Cukai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bala Sakti Kota Tebing Tinggi;	21/1/2024 AA
2	Efektivitas Pengawasan Dalam Menetapkan Pengujian Pajak dalam Menetapkan Pengujian Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Desa Kecamatan Bala Sakti Kota Tebing Tinggi;	
3	Keagamaan Pengawasan P- pajak terhadap Efektivitas Pengujian Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Desa Kecamatan Bala Sakti Kota Tebing Tinggi;	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 20....

Ketua

Program Studi.....

[Signature]
 (.....)
 NIDN:

Pemohon,

[Signature]
 (Angela Gani Sumpina P.)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi.....

[Signature]
 (.....)
 NIDN:

48

PB: KHAIDIR ALI S.Sos M.A





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/002/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8022400 - 80224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 239/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **31 Januari 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ANUGRAH GUSTI SAMPURNA PAKPAHAN**
N P M : 2003100009
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING LURAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI**
Pembimbing : **KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 048.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 31 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 26 Rajab 1445 H
07 Februari 2024 M

Dr. ARIFIN SAFEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dua Momen yang Menginspirasi
Setiap Langkah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAH-PTIAK/KR/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 622400 - 6224067 Fax. (061) 622474 - 621503
@fkip@fkip.umsu.ac.id *fkip@umsu.ac.id #umsu #umsu #umsu #umsu

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, 5 MARET 2024
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ANUGRAH GUSTI SAMPURNA PAKPAHAN
NPM : 2003100009
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomer 23.9./SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/20.24, tanggal dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING LUKAH DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI
KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui:
Pembimbing
(Khasbi Ali, S.S., MPA)
NIDN:

Pemohon,
(ANUGRAH GUSTI S.P.)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 431/UND/II.3.AU/UMSU-03/IF/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 07 Maret 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	KHAIRUN NISA	2003100031	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	PENGARUH PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSRENBANG 2023 KELURAHAN PELAN LABUJAH KOTA MEDAN
7	SALWA ANWISA ZAIN	2003100003	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF POLISI SYARAH WILAYATUL HISBAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PARWISATA BERBASIS SYARIAH DI KOTA LHOEKSEUMAWE
8	AKUGRAH GUSTI SAMPURNA PAKPAHAN	2003100009	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING LURAH DALAM FEMUNZINTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI
9	SOFIA PUTRIYANI PURBA	2003100002	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFFAN AL-QUDUS, S.Sos., M.Si.	PENGARUH FUNGSI DIRECTING DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PADA PROGRAM KAMPUNG KB DI KELURAHAN GAHARU KOTA MEDAN
10	YAYA ARDJANI NAMIRA	2003100035	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	PENGARUH FUNGSI CONTROLLING DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA PADA PROGRAM KAMPUNG KB DI KELURAHAN HARJOSARI II KOTA MEDAN

Medan, 24 Februari 1445 H
15 Maret 2024 M



(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.)

UMSU



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1917/GK/BDAN-PTIAK/KP/PT/002022
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Fauzi No. 3 Medan 20220 Telp. (061) 8622400 - 8622487 Fax. (061) 8625474 - 8631903
@pusat@ump.unsma.ac.id *@psip@umsu.ac.id #umsuamedan @umsuamedan @umsuamedan @umsuamedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ALMUTRIAN GUSNI SAMBURA BAKHAWAN
NPM : 2003100009
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING LURAH DALAM PEMERINTAHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN DANDAR SAKTI KOTA
TEBING TINGGI

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf/Pembimbing
1	24/2024 Februari	Bimbingan proposal SKRIPSI	
2	7/2024 Maret	Bimbingan proposal SKRIPSI	
3	5/2024 Maret	Bimbingan proposal SKRIPSI	
4	7/2024 Maret	Seminar proposal SKRIPSI	
5	10/2024 Maret	Bimbingan draft wawancara SKRIPSI	
6	6/2024 Juni	REVISI draft wawancara SKRIPSI	
7	9/2024 Juli	Bimbingan REVISI SKRIPSI	
8	11/2024 Juli	ACC SKRIPSI untuk sidang meja hijau	

Medan, 31 Juli 2024



(Dr. Arif Saleh, S.Sos., M.S.P.)
NIDN: 003017402

Ketua Program Studi,

(Rozalia Mulya Rizka, S.S., M.S.P.)
NIDN: 0122118801

Pembimbing,

(Rahmatul Huda, S.S., M.P.A.)
NIDN: 0109099401





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/QK/DAN-PT/AK.KP/PT/03/2023
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/QK/DAN-PT/AK.KP/PT/03/2023
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 512/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 09 Ramadhan 1445 H
19 Maret 2024 M

Kepada Yth : Lurah Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : ANUGRAH GUSTI SAMPURNA PAKPAHAN
N P M : 2003100009
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING LURAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan

Dr. ARIFIN SAIIEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
KECAMATAN BAJENIS
KELURAHAN BANDAR SAKTI

Jalan Cengkeh No 2, Lk. 1, Bajenis, Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20621, Telp. -

Tebing Tinggi, 03 April 2024

Nomor : 400.12.2.1 / 550 / BS / 2024
Lampiran : -
Hal : Riset Mahasiswa

Kepada Yth;

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3
Medan 20238**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat No : 400.12.2.1 / 550 / BS / 2024 mengenai izin Riset Pendahuluan Mahasiswa, dapat kami setuju dilaksanakan di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Jl. Cengkeh No 2, Lk. 1, Bajenis Tebing Tinggi mulai tanggal 03 April 2024 atas nama:

Nama : Anugrah Gusti Sampurna Pakpahan
NPM : 2003100009
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Kegiatan Riset dilaksanakan dengan mematuhi peraturan yang berlaku dikelurahan Bandar Sakti Tebing Tinggi. Saat akan melaksanakan Riset diharapkan mahasiswa membekali dengan surat keterangan yang berlaku. Akomodasi, transportasi dan konsumsi termasuk apabila terjadi kecelakaan kerja dalam pelaksanaan Riset menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tebing Tinggi, 03 April 2024

Plt. LURAH BANDAR SAKTI
KECAMATAN BAJENIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UNDANGAN PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 1295/UND.II.3.AUMASU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 01 Agustus 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	MUHAMMAD ALFANDI	2003100001	NALIL KHAIRAH, S.IP, M.Pd	KHAIDIR ALI, S.Sos, M.Pd	Assoc. Prof. Dr. NITI HAJAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERDA NO.14/CR/10 TAHUN 2021 TENTANG TERBIT JALAN DI KOTA MEDAN
2	ANUGRAH GUSTI SHANTI PRINA PAKPAHAN	2003100009	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	Dr. JEBAN RIDHO ZHARISTAL, S.Sos., M.Si	KHAIDIR ALI, S.Sos, M.Pd	EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING LURAH DALAM PEMUNGUTAN PALAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI
3	NABILA LILINTAZA HASLUTION	2003100056	DEDI ANIRIZAL, S.Sos, M.Si	KHAIDIR ALI, S.Sos, M.Pd	MUJIL KHARUHAH, S.IP, M.Pd	FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL KEPIMPINAN DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SERAM (GESER SAMPAH MALAM) DI KELURAHAN HELVETIA TENGAH KOTA MEDAN
4	LISTI RIYAYANI	2003100087	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Dr. JEBAN RIDHO ZHARISTAH, S.Sos., M.Si	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	FUNGSI KOORDINASI DIVISIONAL DIMAS SOSIAL DALAM PENGENDALIAN DAN PELAYANAN REHABILITASI GELANDANGSING DAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN
5	SALVIA ANNISA ZAHN	2003100003	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	DEDI ANIRIZAL, S.Sos, M.Si	STRATEGI PENGAWASAN WISATA BERBASIS SYARIAH DI KOTA LHOEKSU-LIWE

Melalui Sidang.

Medan, 24 Muharrem 1446 H
30 Juli 2024 M

Ditandatangani oleh:
Rektor
Prof. Dr. HUSNANDI HUSNANDI, S.T, M.Hum

Setretaris
Papriyanti
Prof. Dr. ABBAS ADHANI, M.Kom

Dr. AUFIN SALEH, S.Sos., MSP.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Anugrah Gusti Sampurna Pakpahan
Tempat, Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 03 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. KF TANDEAN GG WANKURSANI LK,VI
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

Data Orang Tua

Ayah : MUHKHLIS PAKPAHAN
Ibu : SRI MULIANI Am.keb
Alamat : Jl. KF TANDEAN GG WANKURSANI LK,VI


Pendidikan Formal

1. SD Negeri 165733 Kota Tebing Tinggi
2. SMP Negeri 5 Kota Tebing Tinggi
3. SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi
4. Terdaftar sebagai mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administerasi Publik Konsentrasi Administerasi Pembangunan Tahun 2024

Demikian daftar riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya, untk dapat sipergunakan dengan sepenuhnya.

Medan, Oktober 2024

Penulis


Anugrah Gusti Sampurna Pakpahan